

SKRIPSI

Pengaruh Tahap Persiapan, Ratifikasi, Pelaksanaan, serta Pelaporan dan Evaluasi terhadap Akuntabilitas pada Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Disusun Oleh :

NAMA : NANANG ANDUWIDADGO
NPM : 1932090102



**PROGRAM SARJANA TERAPAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
TAHUN 2020**

**Pengaruh Tahap Persiapan, Ratifikasi, Pelaksanaan,
serta Pelaporan dan Evaluasi terhadap
Akuntabilitas pada Biro Keuangan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Terapan
dalam Ilmu Administrasi Negara**

Disusun Oleh :

**NAMA : NANANG ANDUWIDADGO
NPM : 1932090102
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



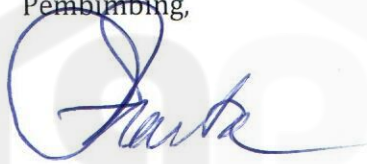
**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA
TAHUN 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, 17 November 2020

Pembimbing,



Drs. Agoes Inarto, M.M.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir Program Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta Lembaga Administrasi Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2020

Ketua merangkap anggota,



Tintin Sri Muntiah S.E., M.M.

Sekretaris merangkap anggota,

A blue ink signature of Nurmita Sari, written in a cursive style.

Nurmita Sari, S.E., M.M.

Anggota

A blue ink signature of Drs. Agoes Inarto, written in a cursive style.

Drs. Agoes Inarto, M.M.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Anduwidagdo

NPM : 1932090102

Jurusan : ☐ Administrasi Publik :

☐ APN

☐ MSDMA

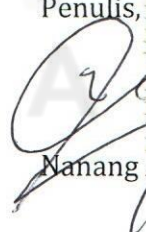
☒ Administrasi Bisnis : ABSP

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul **"Pengaruh Tahap Persiapan, Ratifikasi, Pelaksanaan, serta Pelaporan dan Evaluasi terhadap Akuntabilitas pada Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia"** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 16 November 2020

Penulis,


Nanang Anduwidagdo



KATA PENGANTAR

Segala puji untuk Allah Subhanallahu Wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kebaikan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“Pengaruh Tahap Persiapan, Ratifikasi, Pelaksanaan, serta Pelaporan dan Evaluasi terhadap Akuntabilitas pada Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”**.

Pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan guna meraih gelar Sarjana Terapan Ilmu Administrasi Bisnis Sektor Publik pada Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara - Lembaga Administrasi Negara (Politeknik STIA LAN) Jakarta. Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini, khususnya kepada Bapak Drs. Agoes Inarto, M.M. selaku Pembimbing, yang dengan ilmu dan kesabarannya memberikan bimbingan, arahan dalam dan saran-saran dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bapak R. Edy Susila S.H., selaku Kepala Biro Keuangan BPK.
3. Bapak dan Ibu Dosen di Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan ilmu serta bimbingan bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Ibu Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) beserta jajarannya, atas bantuan yang telah diberikan kepada

penulis selama menempuh perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

5. Ibu, istri, dan anak-anak tercinta serta seluruh keluarga, atas motivasi dan bantuan spiritual untuk menyelesaikan perkuliahan.
6. Rekan-rekan kerja di Biro Keuangan BPK dan teman-teman mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik (ABSP) angkatan 2019, atas ilmu dan partisipasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tentunya masih dipenuhi banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi peneliti sendiri, Politeknik STIA LAN Jakarta, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Jakarta, November 2020
Penulis,

NA

ABSTRAK

Nanang Anduwidagdo, 1932090102

PENGARUH TAHAP PERSIAPAN, RATIFIKASI, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN DAN EVALUASI TERHADAP AKUNTABILITAS PADA BIRO KEUANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Skripsi, xiii hlm., 91 halaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi terhadap akuntabilitas Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Variabel penelitian ini adalah akuntabilitas Biro Keuangan BPK (Y) sebagai variabel terikat, Tahap Persiapan (X1), Tahap Ratifikasi (X2), Tahap Pelaksanaan (X3), dan Tahap Pelaporan dan Evaluasi (X4) sebagai variabel bebas.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, karena bermaksud membuktikan variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Teknik sampling menggunakan *simple random sampling* terhadap 37 responden. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penyebaran kuesioner tertutup. Teknik analisis data menggunakan *software* SPSS untuk melakukan uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji kecocokan.

Penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh positif Tahap Persiapan, Tahap Ratifikasi, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan dan Evaluasi, baik secara parsial maupun simultan, terhadap Akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK. Untuk itu peneliti menyarankan untuk tetap memberikan perhatian pada keseluruhan tahap penganggaran terutama pada tahap ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi, sehingga mampu mempertanggung jawabkan dan menunjukkan akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan.

Kata kunci: Penganggaran berbasis kinerja, Akuntabilitas.

ABSTRACT

Nanang Anduwidagdo, 1932090102

The Effect of Preparation Phase, Ratification Phase, Implementation Phase, and Reporting and Evaluastion Phase to Levels of Accountability at the Bureau of Finance Audit Board of the Republic of Indonesia
Skripsi, xiii, 91 pages.

This study aims to find out the effect of Preparation Phase, Ratification Phase, Implementation Phase, and Reporting and Evaluastion Phase to Levels of Accountability at the Bureau of Finance Audit Board of the Republic of Indonesia. The variables in this study are Levels of Accountability at the Bureau of Finance Audit Board of the Republic of Indonesia (Y) as dependent variable, while Preparation Phase (X1), Ratification Phase (X2), Implementation Phase (X3), and Reporting and Evaluastion Phase (X4) as independent variables.

The research method used is quantitative research method because this study intend to prove that independent variables may contribute to dependent variable partially and simultaneously. The sampling technique used is simple random sampling and the number of sample is 37 respondents. Data collection techniques consisted of literature studies and distribution of closed-ended questions questionnaires. To assist with analysis of quantitative data gathered from the respondents, SPSS software is utilized to run the test for normality, the classical assumption test, the hypothesis test, and the goodness of fit test.

The conclusion drawn from this study indicate that the application of Preparation Phase, Ratification Phase, Implementation Phase, and Reporting and Evaluastion Phase, both partially and simultaneously, has postitive effect on the Levels of Accountability at the Bureau of Finance Audit Board of the Republic of Indonesia. Recommendations provided for improving levels of accountability, by maintaining attention and supervision to every phase especially Ratification Phase, Implementation Phase, and Reporting and Evaluastion Phase, so as be able to account every planned and budgeted activity.

Keywords: *Performance-Based Budgeting, Accountability.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I. PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. KERANGKA TEORI.....	8
A. Tinjauan Teori	8
1. <i>Administrasi</i>	8
2. <i>Manajemen</i>	10
3. <i>Good Governance</i>	15
4. <i>Akuntabilitas</i>	16
5. <i>Aspek-aspek Akuntabilitas</i>	18
6. <i>Anggaran</i>	19
B. Penelitian-penelitian Terdahulu.....	26
C. Definisi Operasional Variabel dan Indikator-indikator Variabel.....	31
1. <i>Identifikasi Variabel</i>	31
2. <i>Definisi Operasional Variabel dan Indikator-indikatornya</i>	32
3. <i>Indikator-indikator Variabel</i>	34

D. Kerangka Berpikir	36
E. Hipotesis Penelitian.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian.....	40
B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling	40
1. <i>Populasi</i>	41
2. <i>Sampel</i>	42
3. <i>Teknik Sampling</i>	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
1. <i>Sumber Data Primer dan Sekunder</i>	44
2. <i>Instrumen Penelitian</i>	44
3. <i>Uji Validitas dan Reliabilitas</i>	47
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	51
1. <i>Teknik Pengolahan Data</i>	51
2. <i>Teknik Analisis Data</i>	52
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	68
A. Gambaran Objek Penelitian.....	68
B. Analisis Hasil Penelitian.....	72
1. <i>Hasil Uji Normalitas Data</i>	74
2. <i>Hasil Uji Asumsi Klasik</i>	74
3. <i>Uji Korelasional</i>	77
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keluaran, capaian, dan realisasi Biro Keuangan BPK pada Tahun Anggaran 2019	3
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Biro Keuangan BPK Tahun Anggaran 2019	5
Tabel 3. Nilai Kinerja BPK Tahun Anggaran 2012-2018	5
Tabel 4. Matriks Perbandingan Fungsi-fungsi Manajemen	13
Tabel 5. Penelitian-penelitian Terdahulu	27
Tabel 6. Indikator-indikator Variabel Bebas (X)	35
Tabel 7. Indikator-indikator Variabel Terikat (Y)	35
Tabel 8. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	46
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	50
Tabel 10. Hipotesis dan Teknik Statistik yang Digunakan untuk Analisis	53
Tabel 11. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	57
Tabel 12. Rangkuman Hasil Statistik Deskriptif	71
Tabel 13. Rangkuman Hasil Statistik Inferensial	73
Tabel 14. Rangkuman Hasil Korelasi Parsial	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Manajemen Stratejik.....	12
Gambar 2. Paradigma Penelitian	36
Gambar 3. Nomogram Harry King untuk Menentukan Ukuran Sampel.....	42
Gambar 4. Struktur Organisasi Biro Keuangan BPK.....	69
Gambar 5. Grafik Plot Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	75

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan penganggaran berbasis kinerja bagi seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia, melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Peraturan-peraturan ini mengarahkan satuan kerja untuk betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Pengamanatan berikutnya yaitu penetapan prioritas strategis yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk strategi, kebijakan umum, dan program kementerian/lembaga (K/L).

Tahap terakhir dari siklus penganggaran yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, yang terkait dengan aspek akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap kementerian/lembaga (K/L) sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja sesuai dengan visi dan misinya. Akuntabilitas kinerja diwujudkan secara terukur dan periodik

kepada para pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi dan integritas kementerian/lembaga (K/L) tersebut.

Akuntabilitas merupakan salah satu kunci perwujudan *good governance* dan *result oriented government*. Hal ini dikarenakan dalam akuntabilitas kinerja, terdapat kewajiban-kewajiban untuk menjalin hubungan-hubungan yang bertanggung jawab, mengorientasikan kegiatan-kegiatan pada hasil, memberikan laporan terinci mengenai pencapaian kinerja, memberikan konsekuensi bagi organisasi, baik berupa penghargaan maupun hukuman, serta merencanakan kegiatan-kegiatan yang berfokus peningkatan kinerja.

Akuntabilitas terwujud dalam pemberian laporan yang berisi informasi finansial kepada para pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk menilai pertanggungjawaban organisasi atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam periode tertentu, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan. Artinya, akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan atas hak-hak publik dalam hal keterbukaan informasi.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, BPK sebagai lembaga sektor publik yang bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menerbitkan Laporan Kinerja sebagai media komunikasi BPK kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini diharapkan dapat

menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Adapun Biro Keuangan BPK, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun Anggaran 2019, Biro Keuangan BPK mengelola pagu anggaran sebesar Rp25.663.635.000,00 dengan detail keluaran serta capaian dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 1.
Keluaran, capaian, dan realisasi Biro Keuangan BPK pada Tahun Anggaran 2019

Uraian	Keluaran			Anggaran		
	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Perangkat Lunak di Bidang Pengelolaan Keuangan	3	3	100	373.097.000	362.778.507	97,23
Layanan Penganggaran dan Pemantauan	16	16	100	10.616.946.000	10.613.531.111	99,97
Layanan Perbendaharaan	4	4	100	3.940.076.000	3.901.637.127	99,02
Layanan Akuntansi dan Pelaporan	8	8	100	7.366.436.000	7.361.615.927	99,93
Layanan Perkantoran	1	1	100	3.367.080.000	3.332.730.000	98,98
	32	32	100	25.663.635.000	25.572.292.672	99,64

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (2020:6)

Kinerja Biro Keuangan BPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya diukur berdasarkan beberapa hal, antara lain:

1) Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Pemantauan

Diukur berdasarkan optimalisasi pemenuhan ketepatan waktu penyelesaian pengajuan revisi anggaran dan optimalisasi pemanfaatan

anggaran, yang tidak hanya berfokus pada banyaknya penyerapan anggaran dan pencapaian keluaran saja, melainkan juga pada konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta efisiensi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga .

2) Efisiensi dan Efektivitas fungsi perbendaharaan

Diukur berdasarkan pemenuhan ketepatan waktu proses pencairan tagihan sesuai peraturan yang berlaku, serta ketepatan sasaran dalam pemenuhan kebutuhan para pemilik kepentingan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

3) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahunan BPK

Diukur berdasarkan keberhasilan menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan secara sebagai bentuk perbaikan pengelolaan keuangan negara di lingkungan BPK

BPK telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara bertahap sejak tahun 2005 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sedangkan pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan, target kinerja BPK selalu tercapai setiap tahun dan menunjukkan kecenderungan

peningkatan nilai kinerja dari tahun ke tahun, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Tahun Anggaran 2012 - 2018.

Hasil atas evaluasi kinerja Biro Keuangan BPK tahun anggaran 2019 serta pencapaian nilai kinerja dari tahun anggaran 2012 - 2018 disajikan dalam tabel 2. dan tabel 3. berikut ini.

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Biro Keuangan BPK Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	TARGET 2019	CAPAIAN				
			2019	2018	2017	2016	2015
1.	Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Pemantauan						
1.1	Pemenuhan Ketepatan Waktu Penyelesaian Pengajuan Revisi Anggaran	10,00	6,66	9,96	5,86	6,27	16,36
1.2	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA BPK	88,00%	95,44%	92,09%	86,15%	90,25%	80,71%
2.	Efisiensi dan Efektivitas fungsi perbendaharaan						
2.1	Persentase Ketidaktepatan Waktu Proses Pencairan Tagihan melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.2	Persentase Ketidaktepatan Waktu Proses Pencairan Tagihan Mekanisme Langsung (LS)	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,06%	0,51%
3.	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahunan BPK						
3.1	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Itama yang Relevan Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi KAP yang Relevan Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	105%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (2020:14)

Tabel 3.
Nilai Kinerja BPK Tahun Anggaran 2012-2018

Nilai Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Realisasi	87,84	88,97	89,23	94,15	97,70	94,83	100,02

Sumber: Data Olahan Peneliti

Biro Keuangan BPK juga secara konsisten meraih predikat “Sangat Baik” atas nilai pencapaian kinerja anggaran tahun 2018 - 2019, yang penilaiannya

didasarkan pada nilai capaian sasaran strategis dan rata-rata nilai kinerja anggaran unit kerja.

Peneliti mengambil obyek penelitian pada Biro Keuangan BPK yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dan masih diterapkan hingga sekarang. Siklus anggaran pada Biro Keuangan terdiri tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan dan evaluasi anggaran.

Biro Keuangan BPK dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang baik, sehingga mampu mempertanggungjawabkan program dan kegiatannya untuk memenuhi target pencapaian kinerja dan mencapai keberhasilan pencapaian misi BPK. Penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas Biro Keuangan BPK. Kondisi ini membuat peneliti membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Tahap Persiapan, Ratifikasi, Pelaksanaan, serta Pelaporan dan Evaluasi terhadap Akuntabilitas pada Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”**.

B. Pokok Permasalahan

Terdapat dugaan adanya hubungan antara tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi pada siklus anggaran dengan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, dalam hal ini Biro Keuangan BPK. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi, serta variabel terikat

yaitu akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK. Dengan demikian pokok permasalahan dalam penelitian ini: “Bagaimana pengaruh tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi banyak pihak, antara lain:

1. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik

Dengan mengetahui pengaruh tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang teori-teori yang berkaitan dengan ilmu-ilmu administrasi dan manajemen dalam pertanggungjawaban penganggaran.

2. Manfaat terhadap kepentingan praktik

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait dalam persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi anggaran, sehingga lebih meningkatkan pemenuhan akuntabilitas di masa yang akan datang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat dan positif antara variabel-variabel bebas: Tahap Persiapan (X_1), Tahap Ratifikasi (X_2), Tahap Pelaksanaan (X_3), serta Tahap Pelaporan dan Evaluasi (X_4) terhadap Akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK (Y), sebagaimana ditunjukkan dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,894. Ini berarti tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan dan evaluasi berpengaruh kuat dan searah terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK. Berdasarkan koefisien korelasi tersebut, dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,872, artinya 87,2% variabel-variabel yang diteliti, yaitu: tahap persiapan, tahap ratifikasi, tahap pelaksanaan, serta tahap pelaporan dan evaluasi, secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK. Sedangkan 12,8 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar variabel-variabel yang diteliti.

Dengan nilai r_{tabel} sebesar 0,3426 dan nilai F_{tabel} sebesar 2,67 untuk tingkat signifikansi 0,05, maka korelasi parsial untuk masing-masing variabel bebas dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Tahap persiapan memiliki pengaruh yang searah dan lemah terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK, berdasarkan nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) sebesar 0,496 yang lebih tinggi dari nilai r_{tabel} .
- 2) Tahap ratifikasi memiliki pengaruh yang searah dan kuat terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK, berdasarkan nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) sebesar 0,900 yang lebih tinggi dari nilai r_{tabel} .
- 3) Tahap pelaksanaan memiliki pengaruh yang searah dan kuat terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK, berdasarkan nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) sebesar 0,916 yang lebih tinggi dari nilai r_{tabel} .
- 4) Tahap pelaporan dan evaluasi memiliki pengaruh yang searah dan kuat terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK, berdasarkan nilai koefisien korelasi (r_{hitung}) sebesar 0,886 yang lebih tinggi dari nilai r_{tabel} .
- 5) Tahap persiapan, ratifikasi, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang searah dan kuat terhadap akuntabilitas pada Biro Keuangan BPK, berdasarkan nilai F_{hitung} sebesar 54,514 yang lebih tinggi dari nilai F_{tabel} .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas peneliti mengajukan beberapa hal yang dapat dijadikan saran penelitian ini, sebagai berikut.

- 1) Bagi Biro Keuangan BPK, untuk mempertahankan atau meningkatkan akuntabilitas, hendaknya menempuh langkah-langkah berikut ini.

- a. Peningkatan *managerial skill*, *political skill*, *salesmanship*, dan *coalition building*, serta pengetahuan mengenai kebutuhan anggaran.
 - b. Peningkatan kapasitas sistem informasi dan pengendalian anggaran serta kompetensi pengelola anggaran.
 - c. Peningkatan perhatian terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan-laporan pelaksanaan anggaran serta kualitas tindak lanjut pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas pemilihan variabel beserta indikatornya, untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas suatu lembaga, guna mendorong terwujudnya *good governance*. Adapun variabel-variabel lain yang diduga juga berpengaruh terhadap akuntabilitas, di luar variabel-variabel bebas yang telah diteliti, antara lain: partisipasi publik, nilai pendapatan dan belanja satuan kerja, dan kejelasan sasaran anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2009). *Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Basuki, Johan. (2018). *Administrasi Publik: Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok: Rajawali Pers.
- David, Fred R. (2011). *Strategic Management: Concept and Case*. 13th Ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Ghozali, Imam (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gulo, W. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo
- Halim, Abdul dan Kusufi, M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Koontz, Harold and O'Donnell, Cyril. (1955). *Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions*. New York: McGraw-Hill.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nafarin, M. (2000). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2010). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. (2004). *Filsafat Administrasi. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis. Edisi Ketujuh*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Taufiqurokhman dan Satispi, Evi. (2018). *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang Selatan: UMJ Press.
- The World Bank (2007). *Local Budgeting*. Washington: Office of The Publishers of The World Bank.
- Ulum, Ihyaul dan Sofyani, Hafiez. (2016). *Akuntansi (Sektor) Publik*. Malang: Aditya Media.
- Wijaya, Candra dan Rifa'i, Muhammad. (2016). *Dasar-dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Medan: Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana.

B. Artikel/Jurnal

- Agustrian, N, L., Rizkan, R., dan Izzudin, M. (2018). *Manajemen Program Life Skill di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu*. Journal of Community Development, 1 (1), (7-13). <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpls/article/view/4031>
- Dwiputrianti, S. dan Suharsini. (2012). *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) Terhadap Efisiensi, Efektivitas Dan Akuntabilitas Pada Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung*. Jurnal Ilmu Administrasi, 9 (3), (309-329). <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/309/283>

- Fanani, I. dan Djati, S. P. (2016). *Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (Ocb) (Studi Kasus RSUD UKI)*. FUNDAMENTAL Management Journal, 1 (4), (40-53). DOI:10.33541/fjm.v1i04.246
- Friska, I. Y. (2015). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 1 (1), (75-81). <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/2381>
- Marliani, Lina (2018). *Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5 (4), (17-21). DOI: 10.25157/dinamika.v5i4.1743
- Prasetya, Ardan (2018). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 3 (1), (1-12). DOI: 10.33105/itrev.v3i1.17
- Safaruddin dan Basri, S. (2016). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1 (1), (93-105). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JURNALAKUNTANSIKEUANGAN/article/view/2026>
- Sawir, Muhammad. (2017). *Konsep Akuntabilitas Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan, 1 (1), (9-18). <http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/jurnalafisip/article/view/395/352>
- Shofi A, M., Puspitorini Y. A. R., dan Sin, M. (2016). *Hubungan Karakteristik Dengan Aspirasi Bekerja Dalam Bidang Agroindustri Perikanan pada Pemuda Pedesaan di Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember*. Jurnal Ilmiah Inovasi, 13 (2), (112-119). DOI:10.25047/jii.v13i2.32
- Sofie, F. dan Fitria, S. (2016). *Identifikasi Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Usaha Menengah (Studi Pada Cv Kota Agung)*. Jurnal Wacana Ekonomi, 18 (1), (1-12). <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/454>
- Soraya, G., dan Rika, C. (2014). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada*

Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan. Jurnal Forbiswara, 1 (1), (1-10). <http://eprints.mdp.ac.id/1378/1/JURNAL.pdf>

Sugiarto, Edie (2016). *Analisis Emosional, Kebijakan Pembelian Dan Perhatian Setelah Transaksi Terhadap Pembentukan Disonansi Kognitif Konsumen Pemilik Sepeda Motor Honda Pada Ud. Dika Jaya Motor Lamongan*. Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen, 1 (1), (34-47). DOI: 10.30736/jpim.v1i1.4

Syamsuddin. (2017). *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jurnal Idaarah, 1 (1), (60-73). DOI: 10.24252/idaarah.v1i1.4084

C. Peraturan

Lembaga Administrasi Negara. (2003). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <https://monev.bps.go.id/esakip/Pustaka/SK-LAN-239-2003-SAKIP.pdf>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <https://sumsel.bpk.go.id/?p=3306>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, DKI: Penulis. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/113661>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, DKI: Penulis. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/190~PMK.05~2012Per>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, DKI: Penulis. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/195~PMK.05~2018Pe>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137057>

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Jakarta, DKI:
Penulis. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51467>

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta,
DKI: Penulis. Diakses dari
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5115>

D. Situs Web Umum

Junaidi. (2010, 24 April). Download Tabel Durbin-Watson (DW) Lengkap.
Diperoleh dari <https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/24/download-tabel-durbin-watson-dw-lengkap/>

Junaidi. (2010, 22 April). Download Tabel F Lengkap. Diperoleh dari
<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/22/download-tabel-f-lengkap/>

Junaidi. (2010, 24 Mei). Download Tabel r Lengkap. Diperoleh dari
<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/05/24/download-tabel-r-lengkap/>

Junaidi. (2010, 21 April). Download Tabel t untuk d.f = 1 – 200. Diperoleh dari
<https://junaidichaniago.wordpress.com/2010/04/21/download-tabel-t-untuk-d-f-1-200/>

E. Dokumen-dokumen Lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018*. Jakarta, DKI: Penulis. Diakses dari <https://www.bpk.go.id/page/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah--lakip->

Nurtiani, Dian. (2010). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.

Rezeqiah, Ana Muchlisa. (2017). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A